

# NEW Book Chapter Hilirisasi

*by - -*

---

**Submission date:** 11-Jan-2024 07:10AM (UTC-0600)

**Submission ID:** 2190074685

**File name:** NEW\_Book\_Chapter\_Hilirisasi.docx (144.36K)

**Word count:** 4007

**Character count:** 32095

# BAB 1

## KEBIJAKAN HILIRISASI PRODUK HASIL TANGKAPAN IKAN LAUT

Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., & Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si.

[nurullistiyani5@gmail.com](mailto:nurullistiyani5@gmail.com)

[amir.syamsuadi@univrab.ac.id](mailto:amir.syamsuadi@univrab.ac.id)

### A. Kebijakan

Dapat dipahami bahwa istilah kebijakan secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris pada masa pertengahan yaitu "*policie*", yang berasal dari kata Prancis kuno yakni *police* dan *policie*. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan kebutuhan. Proses kebijakan mencakup identifikasi informasi dan kemungkinan menentukan pilihan atau alternatif, penentuan dan penetapan program-program, tindakan nyata, pembelanjaan prioritas, dengan memilih diantara alternatif-alternatif tersebut berdasarkan kualitas dan keluasan dampak atau manfaat atau risiko yang mungkin dapat ditimbulkan.

Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas pelayanan yang diberikan lebih terarah serta mempunyai aturan dan tujuan yang lebih jelas. Kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan.

Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil. Proses kebijakan adalah proses yang meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik menurut pakar adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Walaupun demikian, pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, di sinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

### B. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik

(masyarakat). Kebijakan publik merupakan hasil (output) dari kegiatan politik. Ini adalah bentuk dan apa yang pemerintah ingin lakukan atau tidak ingin melakukan sesuatu yang secara otoritas akan dialokasikannya kepada seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Menurut M. Irfan Islamy bahwa dalam konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara.

Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan pada kepentingan umum, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lebih lanjut, M. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pembuatan kebijakan publik bersumberkan pada bahan yang harus dijadikan dasar pembuatan kebijakan publik adalah berbagai keputusan atau produk hukum yang mempunyai status hukum atau hierarki keputusan atau kebijakan yang lebih tinggi. Bahan yang perlu mendapat pertimbangan adalah berbagai data, informasi, ataupun pemikiran dan saran, yang bersifat objektif yang datang dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar organisasi pemerintah. Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum.

Hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (*policy making*) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, men- dorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (*policy executing*), hukum juga harus difungsikan sebagai sarana pengendali dan sebagai sumber rujukan yang mengikat dalam menjalankan segala roda pemerintahan dan kegiatan penyelenggaraan negara.

Pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi pembuat kebijakan.

Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda, dan ini berarti nilai dan kebiasaan hidup berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Kebudayaan masyarakat dapat membentuk atau mempengaruhi tindakan sosial, tetapi bukan satu-satunya penentu. Kebudayaan hanya salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan masyarakat, yang mencakup nilai, kepercayaan, dan sikap tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana melakukannya, serta bagaimana menjalin hubungan dengan warga negaranya.

Kebijakan publik menjadi paradigma instrumen dalam menyelesaikan konflik antarkelompok dalam masyarakat, dan antara pemerintah dengan swasta. Salah satu sumber konflik, khususnya di dalam masyarakat yang modern, adalah kegiatan ekonomi. Konflik bermula dari berkembangnya kepentingan berbeda antar perusahaan besar dan kecil, pemilik perusahaan dan buruh, debitor dan kreditor, *customer* dan penjual, petani dengan pembeli hasil-hasil pertanian, dan sebagainya. Hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda di atas dapat dikurangi atau diselesaikan dengan kebijakan pemerintah dalam wujud perubahan ekonomi atau pembangunan. Setidaknya ada empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu:

1. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (*actor*), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
2. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
3. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
4. Dampak (*impact*), hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

Berdasarkan tingkatannya, kebijakan publik dapat dikelompokkan dari tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum (strategi)

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat yang lingkupnya berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:

- a. Undang-Undang/UU, yang mana kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR, atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU/Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- b. Peraturan Pemerintah/ PP untuk mengatur pelaksanaan UU, yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden.
- c. Keputusan Presiden/Kepres atau Instruksi Presiden/ Inpres, yang Berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden.
- d. Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu presiden dapat mengeluarkan Maklumat Presiden.

## 2. Kebijakan Manajerial

Kebijakan manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi publik dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri, dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan Surat Edaran Menteri.

## 3. Kebijakan teknis operasional

Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam satu publik dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non-departemen.

Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan, keputusan, instruksi pimpinan lembaga non-departemen atau instruksi direktur jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Isi dan jiwa kebijakan teknis ini harus sesuai dengan kebijakan di atasnya dan sudah bersifat pengaturan pelaksanaan secara teknis dan administratif. Peraturan, keputusan, instruksi pimpinan lembaga non-departemen atau instruksi direktur jenderal lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan.

Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat.

Pengalokasian keputusan-keputusan pemerintah kepada anggota masyarakat sudah pasti ada konsekuensinya, baik itu berupa dampak negatif atau positif atau yang diharapkan (*intended*) dan dampak negatif atau yang tidak diharapkan (*unintended*) tetapi ternyata muncul dipermukaan yang telah disadari atau tidak disadari oleh pembuat kebijakan.

Lingkungan dalam hal ini adalah keadaan sosial ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografi dan sebagainya bisa berpengaruh pada inputs, dimana tuntutan-tuntutan bisa langsung ditransformasikan ke dalam sistem politik atau karena pengaruh lingkungan juga bisa mati atau tidak dapat diteruskan pada sistem politik. Pengaruh lingkungan pada withinputs bisa mewarnai kuantitas, kualitas, dan kelancaran proses konversi yang pada intinya juga akan berpengaruh pada outputs.

Implementasi outputs pada masyarakat bisa memberikan dampak positif dan negatif juga banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Termasuk pemanfaatan dampak positif dan negatif dari kebijakan publik tersebut sebagai umpan balik (*feedback*) yang akan dipakai atau tidak sebagai input baru dalam proses sistem politik berikutnya. Jadi pengaruh lingkungan ini luas sekali yaitu ke seluruh sub-sub sistem dari sistem politik. Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejala politik yang ada pada suatu negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponsnya, yakni memasukkannya ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan.

Mekanisme pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat lahir karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi pembuat kebijakan. Faktor lingkungan tersebut antara lain karakteristik geografi, seperti sumber daya alam, iklim, dan topografi; variabel demografi, seperti banyaknya penduduk, distribusi umur penduduk, lokasi sosial, kebudayaan, politik, struktur sosial, dan sistem ekonomi. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan Negara. Semua

Negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dikarenakan kebijakan publik adalah domain dari negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memajukan kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul.

### C. Hilirisasi

Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, maka melakukan penguatan secara optimal untuk mendorong keberhasilan kolaborasi, akan menjadi salah satu pendukung dalam rangka meningkatkan peringkat daya saing global. Oleh karena itu sangat diperlukan kebijakan penerapan metodologi yang tepat dalam rangka proses hilirisasi produk. Program hilirisasi atau *downstreaming* merupakan langkah yang sangat efektif untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, program ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas di daerah-daerah pusat industri program tersebut berjalan. Namun, untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan biaya investasi untuk penelitian dan pengembangan produk yang tidak sedikit. Di samping itu, dibutuhkan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dapat membantu mempermudah proses dari program tersebut. Proses hilirisasi atau *downstreaming* merupakan suatu tahap dalam pengolahan produk bahan mentah atau menjadi barang yang lebih bernilai dan siap untuk dijual kepada konsumen akhir.

Hal ini terjadi setelah tahap produksi di pabrik atau tempat pengolahan lainnya dan melibatkan tahapan pemrosesan, pengemasan, distribusi, serta penjualan produk. Dalam istilah yang lebih mudah dipahami, hilirisasi dapat diartikan sebagai proses pengolahan produk hingga siap untuk dijual kepada konsumen akhir.

Hilirisasi adalah implementasi hasil penelitian dalam berbagai hal, sehingga masyarakat bisa turut menikmati hasilnya. Misalnya riset yang berorientasi pada manfaat, seperti cara untuk mencegah banjir atau riset lain yang dapat diaplikasikan di dunia industri. Hasil riset atau penelitian tidak diperkenankan hanya berhenti menjadi laporan, dipublikasikan, dan dipatenkan saja, namun harus sampai menjadi produk yang bisa dikomersilkan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses hilirisasi adalah proses mendekatkan hasil riset dan inovasi kepada penggunaannya. Pengguna dalam hal ini adalah masyarakat. Kategorisasi masyarakat yang dimaksud dapat dimaknai sebagai masyarakat selaku pengguna umum, lembaga pemerintahan, atau industri. Hal ini tidak hanya terbatas kepada produk riset/inovasi (RI) berupa teknologi, prototip dan semacamnya, tetapi juga produk yang berkaitan dengan piranti lunak, kebijakan, sistem, dan lain-lain produk RI. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperluas manfaat dan dampak hasil RI kepada masyarakat.

Dalam konteks bisnis, hilirisasi menjadi hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memberikan peluang pasar yang lebih luas. Dengan mengolah produk hingga menjadi lebih bernilai, harga jual produk dapat ditingkatkan dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi produsen. Selain itu, proses tersebut juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Meskipun demikian, proses tersebut tidak mudah dilakukan. Diperlukan investasi yang besar dan riset yang matang agar produk dapat diolah menjadi lebih bernilai. Selain itu, kebijakan pemerintah dan infrastruktur yang mendukung juga menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Program hilirisasi memiliki banyak manfaat untuk Indonesia. Berikut adalah manfaat-manfaat utama tersebut:

1. Memberikan nilai tambah pada produk awal yang masih mentah akan melalui tahap pengolahan tambahan sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Produk yang telah diolah ini akan memiliki kualitas dan harga jual yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan daya saing di pasar.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan baru proses hilirisasi memerlukan banyak tenaga kerja terampil dan terlatih, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran di daerah sekitarnya.
3. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tingkat daerah sampai nasional produk yang telah diolah akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan nasional.

Dengan demikian, program tersebut dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah hingga tingkat nasional. Menciptakan produk baru yang bisa dipasarkan di pasar internasional dengan dilakukannya hilirisasi, produk yang telah diolah akan memiliki kualitas dan standar



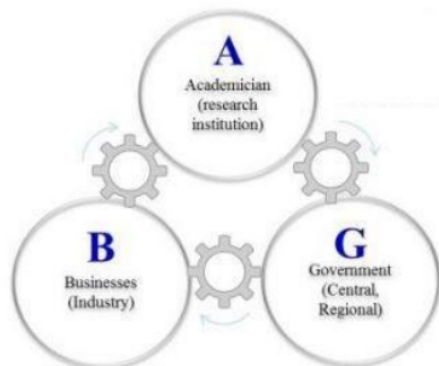
yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar internasional. Dengan adanya produk baru yang dapat dipasarkan di pasar internasional, maka akan membuka peluang baru untuk meningkatkan ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia, sumber daya alam yang ada akan dioptimalkan penggunaannya, sehingga tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga meminimalisir limbah yang dihasilkan.

Dengan demikian, hilirisasi juga dapat memberikan manfaat lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan negara, hilirisasi menjadi salah satu solusi yang efektif. Dengan memberikan nilai tambah pada produk, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan produk baru yang bisa dipasarkan di pasar internasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, maka program tersebut menjadi strategi yang tepat untuk diimplementasikan. Program hilirisasi merupakan program yang sangat penting dan bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian daerah sampai nasional di Indonesia. Selain manfaat ekonomi, manfaat keberlanjutan lingkungan juga bisa didapatkan lewat program tersebut. Namun, program tersebut tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan penuh dari semua *stakeholder* di industri yang ingin melaksanakan program hilirisasi tersebut, seperti lembaga pemerintah, lembaga penelitian, komunitas pengusaha dan masyarakat umum.

#### D. Hilirisasi Produk Berbasis Teknologi

Hilirisasi Produk berbasis teknologi atau juga disebut komersialisasi teknologi, adalah istilah yang digunakan dalam rangka membawa produk invensi hasil riset menjadi produk komersial yang dapat dipasarkan dan menghasilkan keuntungan. Produk komersial yang menarik bagi konsumen dan dapat menghasilkan keuntungan tersebut, sangat ditentukan oleh tingkat keinovasian dari produknya. Hal ini juga merupakan topik yang secara global sangat penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yang membutuhkan keinovasian produk dengan memanfaatkan teknologi digital dan *big data*. Oleh karena itu keterlibatan sejak awal antara elemen lembaga riset atau akademisi (A), industri atau praktisi bisnis (B), dan pemerintah (G) yang berbentuk kolaborasi *triple helix* ABG sangat penting untuk diperhatikan sejak awal.

Gambar 1.2. Ilustrasi Triple Helix ABG  
(Sumber: ABG Principal, 1990)



Keselarasannya antara faktor-faktor ABG dihubungkan dengan roda gigi sinergi. Keselarasan akan tercapai, bila akademisi (A) memiliki invensi teknologi hasil riset yang dapat dikolaborasikan dengan praktisi industri/bisnis, sedangkan kesiapan praktisi bisnis (B) adalah kesiapan untuk dapat mengadopsi inovasi teknologi hasil riset dari akademisi sebagai bisnis inti ataupun sebagai penopang bisnisnya, sehingga dapat tercipta suatu kolaborasi dan sinergi yang baik. Sedangkan kesiapan pemerintah (G) adalah kesiapan dalam mendukung kolaborasi akademisi dan praktisi khususnya dalam hal pendanaan dan kebijakan kemudahan untuk terlaksananya kegiatan kolaborasi tersebut.

Komersialisasi teknologi adalah mengembangkan teknologi sehingga bisa diaplikasikan pada kegiatan produksi yang menguntungkan. Proses komersialisasi teknologi adalah proses yang menghasilkan keuntungan terdiri dari tahap pertama terjadi saat teknologi yang dihasilkan menciptakan lisensi, kemudian tahap kedua terjadi saat teknologi diaplikasikan melalui proses produksi di perusahaan.

Gambar 1.3. Hubungan Faktor ABG dengan Hilirisasi Produk



Proses hilirisasi teknologi secara garis besar terdiri dari 3 tahap, yaitu, investigasi, tahap pengembangan (validasi), dan tahap komersialisasi. Tahap ke-1 adalah tahap penciptaan gagasan/ide yang berbentuk invensi. Sedangkan tahap ke-2 yaitu tahap lembah kematian (*valley of death*), dan tahap ke-3 adalah tahap inovasi yang dilakukan oleh praktisi yang akan memasarkan dan berhubungan langsung dengan konsumennya. Tapap ke-2 sesuai dengan istilahnya, disebut sebagai tahap yang paling sulit dilewati, hal ini banyak disebabkan oleh adanya ego antara akademisi dan praktisi, di mana akademisi mementingkan HKI, sementara itu praktisi lebih mementingkan pada keuntungan finansial yang besar.

#### E. Kebijakan Hilirisasi Produk Hasil Tangkapan Ikan Laut

Dua pertiga wilayah Indonesia tercatat sebagai lautan di mana luas wilayah laut Indonesia mencapai 3,257 juta kilometer persegi, sedangkan luas daratannya mencapai 1,919 kilometer persegi. Data ini berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan menetapkan, total estimasi sumber daya perikanan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI) mencapai 12,01 juta ton per tahun, dengan Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB) 8,6 juta ton per tahun. Estimasi potensi tersebut dibagi dalam sembilan kelompok sumber daya ikan, yaitu ikan demersal, ikan karang, pelagis kecil, cumi, udang penaeid, lobster, rajungan, kepiting, dan pelagis besar.

Sektor perikanan sangat berperan dalam pembangunan nasional sebagai penyerap tenaga kerja mulai dari kegiatan penangkapan, budidaya, proses pengolahan, distribusi hingga perdagangan. Oleh karena itu, pembangunan sektor perikanan membutuhkan perhatian khusus pemerintah pada berbagai aspek mulai dari sektor hulu, aspek pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.

Perspektif tersebut diperlukan kebijakan percepatan industrialisasi hasil perikanan yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Industrialisasi kelautan dan perikanan menurut Permen KP No. PER.27/MEN/2012 adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip:

1. Peningkatan nilai tambah;
2. Peningkatan daya saing;
3. Penguatan pelaku industri kelautan dan perikanan;
4. Berbasis komoditas, wilayah, dan sistem manajemen kawasan dengan konsentrasi pada komoditas unggulan;
5. Modernisasi sistem produksi hulu dan hilir;

6. Kesimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan; dan
7. Perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat modern (transformasi sosial).

Dalam mendukung industrialisasi perikanan, daerah potensial di Indonesia didorong untuk mensinergikan potensi sumber daya dan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Negara Indonesia adalah negara dengan teritorial kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan mencapai 5.877.879 km<sup>2</sup>.

Dengan wilayah perairan yang luas, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup besar. Potensi lestari sumber daya ikan atau *maximum sustainable yield* (MSY) di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton/tahun (80% dari MSY). Kondisi ini diharapkan mampu menempatkan perikanan sebagai salah satu sektor ekonomi yang mempunyai potensi besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Potensi perikanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis yang berada di daerah khatulistiwa. Hal ini memberikan peluang besar terhadap produksi ikan tangkapan ikan laut.

Faktor penyebabnya adalah massa air Barat dan Timur yang melintasi Samudera Hindia membawa partikel yang kaya biota laut. Selain itu, arus Kuroshio (*North equatorial dan South equatorial current*) merupakan wilayah yang kaya dengan bahan makanan serta mempunyai suhu, salinitas dan faktor oseanografi lain yang disukai oleh ikan.

Pengembangan infrastruktur perikanan seperti jalan produksi, saluran air, jalan penghubung kawasan produksi dengan pengolahan sangat diperlukan dalam rangka peningkatan produksi dan percepatan industrialisasi di Kabupaten Rokan Hilir. Fasilitas infrastruktur penting yang diperlukan adalah air bersih dan sanitasi, listrik dan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah harus memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, namun harus melibatkan masyarakat. Infrastruktur jalan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki kontribusi yang positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

Infrastruktur berperan menjalin konektivitas wilayah dan menekan biaya logistik serta menumbuhkan perekonomian suatu wilayah. Infrastruktur jalan merupakan variabel penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi akses infrastruktur jalan memberi kelancaran terhadap mobilitas masyarakat dan arus barang, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja bahkan mengurangi tingkat kemiskinan.

Perikanan laut masih menjadi penyumbang terbesar untuk produksi ikan dunia. Meskipun demikian, kontribusi tersebut menyusut dari 86% menjadi 49% selama 60 tahun pada periode

yang sama. Aquakultur laut dan darat diperkirakan akan mengambil alih produksi perikanan laut dalam beberapa tahun mendatang (FAO, 2017). Berdasarkan data di The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA), produksi ikan dunia pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 196 juta ton, yang terdiri dari 52% berasal dari perikanan budidaya dan 48% dari perikanan tangkap.

Proyeksi ini meningkat signifikan dari data produksi ikan pada 2018 yang sebesar 167,2 juta ton, dengan rincian 44% perikanan budidaya dan 56% perikanan tangkap. Sebagai negara kaya sumber daya ikan, Indonesia telah mampu menyumbang kebutuhan ikan dunia. Ini akan menjadi hal penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi populasi dunia yang akan berjumlah 9,7 miliar penduduk pada tahun 2050. Sementara itu, daerah penyuplai produksi ikan nasional tersebar dari Sabang sampai Papua. Kondisi demikian memberikan gambaran bahwa sektor perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan nasional dan daerah sehingga harus dikembangkan berdasarkan pendekatan bisnis dari hulu hingga hilir.

## **F. Kebijakan Hilirisasi Ikan Laut di Kabupaten Rokan Hilir**

Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di pesisir provinsi Riau dengan hasil kekayaan baik darat dan laut, mempunyai potensi yang menjanjikan. Salah satunya potensi perikanan saat ini masih dapat di jumpai di beberapa kecamatan. Tentunya potensi perikanan tersebut tidak luput menjadi perhatian oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ada banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam menampilkan kekayaan hasil perikanan baik kegiatan tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional sekalipun.



Di Rokan Hilir ada beberapa kecamatan pesisir, yakni Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Pasir Limau Kapas, dan Kecamatan Bangko. Dari 3 kecamatan tersebut merupakan daerah memiliki sentral pengolahan ikan asin. Penyediaan tempat pembuatan ikan asin juga sangat bermanfaat untuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, salah satunya sebagai buruh harian pengolahan ikan asin.

Hal ini menjadi semangat baru pemerintah daerah agar kekayaan perairan Rokan Hilir bisa dinikmati bersama sama, bahkan hasil tangkapan nelayan dalam sehari bisa mencapai 5 hingga 10 ton. Tidak hanya dinikmati oleh pengusaha tangkap ikan namun perhatian potensi perikanan di Kabupaten Rokan Hilir kedepannya bisa menjadi ladang penghasilan bagi masyarakat lainnya. Salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat tempatan. Selain itu, hasil pengolahan ikan tersebut juga menjanjikan meningkatkan nilai ekonomi, bahkan hasil perikanan yang diolah didistribusikan ataupun diperjualbelikan di luar daerah Rokan Hilir seperti Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Bengkalis, hingga kabupaten kota lainnya dan bahkan juga diperjualbelikan untuk luar Provinsi Riau. Perhatian pemerintah daerah terhadap nelayan terutama dalam pengolahan hasil tangkap, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir memberikan sejumlah bantuan dari alat tangkap hingga bantuan peralatan pengolahan ikan.

Tidak terlepas kekayaan potensi perikanan bukan hanya berada di pesisir laut, namun potensi perikanan juga berada di pesisir sungai Rokan, dengan hasil ini secara pembinaan yang diberikan, hasil tangkap nelayan saat ini telah diolah dengan berbagai cara, salah satunya dengan pembuatan ikan salai, dengan harga jual yang tinggi. Untuk mendukung peningkatan pengolahan ikan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan kegiatan pembinaan, pemberian bantuan hingga penyuluhan dari petugas yang berkompeten dimiliki dinas terkait, hal ini guna memberikan ilmu dan pengetahuan yang khusus kepada nelayan dan pengolah ikan di Kabupaten Rokan Hilir.

# NEW Book Chapter Hilirisasi

---

## ORIGINALITY REPORT

---

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)

Internet Source

2%

---

2

[fr.scribd.com](http://fr.scribd.com)

Internet Source

2%

---

3

[repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

1%

---

4

[agrimansion.unram.ac.id](http://agrimansion.unram.ac.id)

Internet Source

<1%

---

5

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

<1%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# NEW Book Chapter Hilirisasi

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---